



Mintarti Curiga Ada Broker KMS

■ Pendistribusian Kartu Menuju Sejahtera Dinilai Tidak Tepat Sasaran

YOGYA, TRIBUN - Sejumlah warga Kota Yogyakarta mengeluhkan distribusi kartu menuju sejahtera (KMS) yang tidak merata. Bahkan, ditengarai adanya broker dalam pengurusan KMS ini. Akibatnya, banyak warga mampu justru menerima program yang sejatinya bertujuan untuk pengentasan kemiskinan ini.

Mintarti (43), warga RT 14 RW 03, Kampung Penumpang, Kelurahan Gowongan, Kecamatan Jetis, menyatakan, sejauh ini pendistribusian KMS masih belum merata. "Saya prihatin, banyak warga yang seharusnya tidak layak menerima KMS. Kalau ada broker untuk KMS, lalu bagaimana pengentasan kemiskin-

an bisa berjalan?" ujar Mintarti, Jumat (10/2).

Menurut wanita yang mengaku bekerja sebagai *supplier* makanan untuk angkringan itu, banyak warga yang seharusnya pantas menerima KMS. Namun, justru tercecer dari bantuan ini. Hal ini lantaran ada beberapa orang yang justru memasukkan para penerima KMS secara subjektif.

Beberapa kali, Mintarti bahkan dimintai tolong oleh tetangganya yang kurang mampu secara ekonomi untuk mengurus KMS. Dia mengaku beberapa kali mengurus ke kantor pemkot setempat dengan dasar kemanusiaan. Apalagi, banyak warga yang



**Saya prihatin,
banyak warga
yang seharusnya
tidak layak
menerima KMS**

Mintarti
Warga Jetis

● ke halaman 14

Mintarti Curiga Ada Broker KMS

• Sambungan Hal 13

kesulitan dalam membiayai pendidikan dan kesehatan.

"Kalau hanya dimanfaatkan segelintir orang mampu dan punya penghasilan tetap, apa gunanya pemerintah memberikan indikator-indikator penerima KMS," tegasnya.

Dia berharap pada pemerintahan di bawah wali kota yang terpilih dapat semakin meratakan pendistribusian KMS. Sehingga, tak ada lagi warga kurang mampu yang tercecer dari daftar KMS. Selain itu, dia berharap program pengentasan kemiskinan dari Pemkot bisa benar-benar berjalan efektif. "Tak ada lagi kesenjangan

dan pembagian KMS yang tidak merata," tandasnya.

Evaluasi

Ketua Komisi D DPRD Kota Yogya, Agung Damar Kusumandaru, mengaku baru mendapatkan informasi mengenai pembagian KMS yang tidak merata. Dia menilai ada beberapa hal yang perlu diverifikasi dalam distribusi KMS tersebut.

"Seharusnya sebelum uji publik dan verifikasi Dinas Sosial bertemu dengan Komisi D. Ada beberapa hal yang keliru, dan kami akan mengevaluasinya," papar Agung.

Dia juga menilai penanggulangan kemiskinan ini juga belum berjalan efektif. Hal ini lantaran Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah warga miskin mencapai 8,75 per-

sen. Hal ini lebih tinggi dari target rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2016 yang menargetkan angka kemiskinan mencapai 8,4 persen.

"Penanggulangan kemiskinan kok belum berjalan, apakah ada kegagalan? Ini yang perlu kami evaluasi," jelas politikus PAN ini.

Dian Novitasari, anggota Komisi D lainnya mengatakan, sejauh ini, KMS juga perlu mendapatkan evaluasi. Pasahnya, pemkot setiap tahun ada pembaharuan data dan verifikasi pada penerima kartu ini.

"Anggaran juga sudah dijamin melalui APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) dan APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara). Namun, masih tinggi angka kemiskinannya," kata

Dian.

Menurutnya, dengan beberapa program pengentasan kemiskinan ini, namun belum mampu menekan angka kemiskinan, maka, program ini harus dievaluasi secara total. Selain evaluasi program, peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) patut juga untuk dievaluasi.

"Ekonomi kota mengalami peningkatan, tapi jika warga miskin tidak terberdayakan berarti ada yang kurang optimal," ulas Dian.

Di sisi lain, indikator kemiskinan dinilai perlu dikaji ulang. Termasuk, kalangan dewan juga akan menelusuri beberapa penyebab kemiskinan itu. Apakah karena adanya faktor pengangguran atau penyebab yang lainnya. (ais)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial	Negatif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005